

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyebar luas secara global. Pertama kali virus Covid-19 ini muncul di kota Wuhan dan menyebar luas ke sebagian Negara 2020 (Abror, Wardi, Trinanda, & Patrisia, 2019) Kurang lebih ada 218 negara yang terkena dampak dari pandemic covid-19 termasuk Indonesia. Penyebaran pandemic covid-19 yang kilat mendesak pemerintah melaksanakan bermacam upaya penanggulangan penyebaran COVID- 19, salah satu upaya tersebut ialah dengan ditetapkannya covid-19 sebagai musibah nasional non-alam lewat Keppres 12 Tahun 2020 sebagai Bencana Nasional tentang Penetapan Musibah Non- alam Penyebaran covid- 19 di Indonesia. Dengan adanya hal ini membuat banyak sektor di pemerintahan yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini, salah satunya di sektor pariwisata.

Pariwisata Indonesia mempunyai banyak andil besar dalam pembangunan ekononmi nasional, dibandingkan dengan kegiatan ekspor barang devisa dari sector pariwisata ini lebih unggul karna menyumbang kontribusi besar terhadap devisa Negara (Nizar, 2015). Namun, pandemi Covid-19 ini memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan social serta pelarangan kunjungan wisatawan antar daerah maupun mancanegara. Semenjak adanya Covid-19 di tengah kehidupan masyarakat membuat kemunduran di sector pariwisata serta

kebijakan untuk menutup destinasi tempat-tempat wisata dengan tujuan agar menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia (Bhaskara, Filimonau, Wijaya, & Suryasih, 2020)

Sampai saat ini penyebaran virus Covid-19 terus meningkat di Indonesia dan membuat penurunan sector ekonomi pada bidang pariwisata. Padahal, pertumbuhan dunia pariwisata dikala ini sudah menghadapi bermacam pergantian, pariwisata saat ini ialah industri *style* baru yang sanggup menyediakan dalam perkembangan ekonomi yang kilat dalam perihal kesempatan kerja, pemasukan, taraf hidup serta dalam mengaktifkan zona lain di dalam negeri penerima turis. Pengembangan zona pariwisata yang dicoba dengan baik serta optimal agar bisa menarik turis buat tiba serta membelanjakan uangnya dalam aktivitas berwisata. Dengan terdapatnya pariwisata, suatu negara ataupun terkhusus di Pemerintah daerah dapat memberikan pendapatan serta pemasukan bagi pemerintah daerah dari segi objek wisata yang dikembangkan pemerintah (Fandi, 2012). Dari hal itulah yang bisa membuat serta mengangkat taraf kehidupan di masyarakat.

Dalam hal ini pariwisata memerlukan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua elemen masyarakat. Oleh karna pemerintah pusat melalui keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19). Dengan dikeluarkannya kebijakan ini dapat membuat

masyarakat beraktifitas kembali dalam adaptasi kebiasaan baru agar produktif dan aman terhadap Covid-19, serta bisa menegembalikan perekonomian pada masyarakat.

Virus Covid-19 tidak hanya berdampak pada penurunan ekonomi di bidang pariwisata nasional (Ukhwatul, 2020) tetapi juga terhadap penurunan ekonomi di bidang pariwisata di daerah- daerah seluruh Indonesia, salah satunya Provinsi Sumatra Barat. Hal yang penting dalam mengembangkan sector pariwisata yaitu wisatawan dan pengunjung yang datang, tetapi saat ini mengalami penurunan drastis karena adanya pengurangan penerbangan Internasional, tidak hanya itu wisatawan nusantara juga mengalami penurunan karna dengan adanya penerpan *social and physical distancing* (Darmawan et al., 2020)

Berbicara mengenai pariwisata, Provinsi Sumatra Barat mempunyai banyak destinasi wisata yang *popular* di Indonesai. Pariwisata di Sumatra Barat saat ini termasuk prioritas bagi pemerintah Sumatra Barat sebagai penopang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat (Ukhwatul, 2020) . Menjadi prioritas oleh pemerintah Sumatra Barat pariwisata harus selalu melakukan pengembangan untuk kesiapan dari segala aspek guna menunjang kesiapan Sumatra Barat menjadi Provinsi dengan banyak petensi destinasi pariwisata. Sektor pariwisata diharapkan menjadi unggulan penopang pertumbuhan ekonomi daerah dengan menjadikannya salah satu prioritas dalam pembangunan dan menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah (Ukhwatul, 2020)

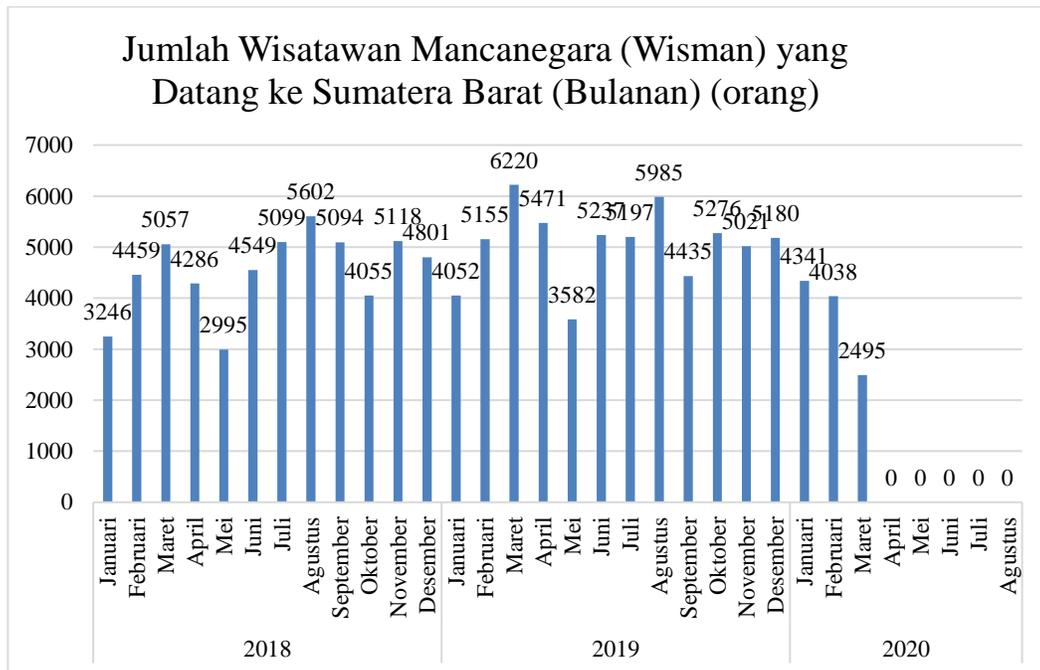
Dalam hal hal ini, Merujuk pada Pasal 12 dalam Undang Undang No 10 Tahun 2009 mengenai kepariwisataan, sesuatu kawasan bisa di golongankan strategis apabila memenuhi beberapa aspek, yang tertera di bawah ini:

1. Sumber energi pariwisata alam serta budaya yang potensial jadi energi untuk menarik pariwisata, mempunyai kemampuan pasar, posisi strategis yang berfungsi dalam melindungi persatuan bangsa serta keutuhan daerah, proteksi terhadap posisi tertentu mempunyai kedudukan yang strategis dalam melindungi fungsi serta daya dukung terhadap lingkungan hidup, posisi juga harus mempunyai kedudukan dalam usaha pelestarian serta pemanfaatan peninggalan budaya, lingkungan harus mempunyai kesiapan serta sokongan masyarakat serta yang terakhir merupakan kekhususan dari suatu daerah.
2. Kawasan strategis buat suatu pariwisata selanjutnya merupakan bisa di kembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan serta kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan warga.
3. Kawasan Strategis Pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.

Saat ini Pemerintah Sumatra Barat terus melakukan pengembangan dunia pariwisata untuk menjadikan sebagai daya tarik untuk kedatangan wisatawan. Hal ini

juga sebagai penunjang agar bisa bersaing dan masuk kedalam pasar pariwisata global. Namun semenjak Maret 2020 yang mulai menyebarnya virus Covi-19 ini membuat menurunnya angka kunjungan wisatawan di Sumatra Barat. Hal ini akibat upaya dari pemerintah un melakukan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 (Herdiana, 2020)

Tabel 1 Perbandingan Kunjungan Wisatawan Mancanegara

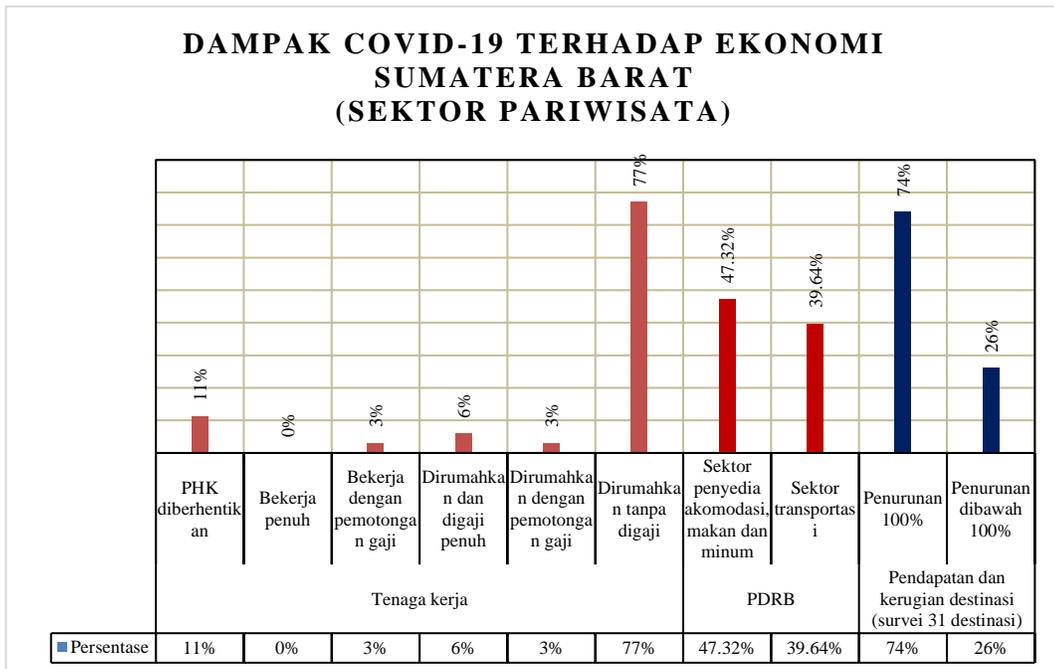


Sumber: (BPS SUMBAR, 2020)

Berdasarkan data tersebut (gambar 1.1) memperlihatkan bahwa adanya penurunan dari kunjungan wisatawan yang datang ke Sumatra Barat. Ini terjadi semenjak adanya kebijakan *travel restric* yang membuat adanya pembatalan dan

pengurangan frekuensi penerbangan, penutupan hotel yang telah mengurangi pasokan dan permintaan pariwisata dalam negeri maupun mancanegara, Christian & Hidayat, 2020 dalam (Ukhwatul, 2020). Dengan kondisi pandemi yang masih terjadi dan tidak adanya kepastian terkait akhir pandemi, ini menjadi kondisi terburuk dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini membuat kunjungan wisman hingga periode maret menjadi representasi kunjungan tahun 2020 serta dengan jumlah ini kunjungan wisman tahun 2020 signifikan meurun dibanding tahun 2019 sebesar- 82%.

Tabel 2 Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Provinsi Sumatera Barat



Sumber : (Ukhwatul, 2020)

Akibat pandemic Covid-19 dan adanya kebijakan dari Pemerintah pusat untuk diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) membuat berhentinya segala kegiatan wisata di Sumatera Barat sejak 22 April hingga 7 Juni 2020 karena adanya peningkatan kasus covid-19. Akibat dari kebijakan tersebut membuat adanya penurunan kunjungan wisatawan yang datang ke Sumatra Barat menurun serta kerugian yang signifikan dari segala aspek seperti yang menjadi penunjang pariwisata seperti, penurunan lapangan usaha transportasi dan perdagangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini membuat menurunnya pendapatan yang berdampak bagi tenaga kerja yang bekerja di sector pariwisata. Padahal pariwisata yang seharusnya mempunyai andil besar dalam pembangunan suatu daerah serta juga menjadi pendapatan suatu daerah dan menjadi penunjang perekonomian dan pendapatan bagi masyarakat.

Menurunnya segala aspek penunjang pariwisata akibat pandemic covid-19 dan ditambah kapan berakhirnya pandemic covid-19 ini belum bisa dipastikan. Maka dampak yang terjadi akan semakin parah terhadap sector pariwisata. Dalam menghadapi masalah serius yang sedang timbul akibat COVID-19 pemerintah harus merancang alur persiapan serta perencanaan guna menangani masalah terburuk yang muncul terutama dibidang pariwisata karena bidang ini cukup memberikan sumbangsih yang besar terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia

Karena begitu berdampaknya Covid-19 bagi sektor pariwisata, Melalui kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif mengeluarkan kebijakan serta panduan

bagi para pelaku dan ekosistem sektor ekonomi kreatif dalam adaptasi kebiasaan baru. Panduan Pelaksanaan Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di sektor ekonomi kreatif merupakan panduan operasional dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Panduan ini ditujukan bagi penghasil, pelaku, pengelola, karyawan, tamu, dan klien dari produk dan jasa kreatif untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa kreatif yang bersih, sehat, dan aman padamasa Pandemi COVID-19

Pada awal pandemi april 2020, UNWTO dalam (Ukhwatul, 2020) merekomendasikan beberapa kebijakan dalam rangka mendorong sektor ekonomi dan mempercepat pemulihan akibat covid-19 melalui sektor pariwisata yaitu;

1. Mengelola krisis dan mitigasi dampak,
2. Rangsangan dan percepatan pemulihan serta
3. Persiapan kedepannya

Melalui peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pecegahan dan pengendalian corona virus disease 2019. Dalam pasal 46 bidang pariwisata, regulasi bertujuan untuk Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, melakukan upaya

terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata serta pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 bidang pariwisata.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas perlunya Pengenalan dan pelaksanaan pariwisata dan memerlukan kajian yang lebih mendalam dalam masa pandemic Covid-19 ini. Hal ini agar bisa meminimalisir dampak yang di akibatkan pandemic covid-19 ini, baik itu dampak kesehatan maupun social ekonomi serta pembangunan dan pengembangan kembali isdustry pariwisata agar dapat berjalan normal kembali setelah Covid-19 ini selesai. Serta hal ini adalah hal baru bagi pegiat pariwisata dan wisatawan yang bakal berkunjung. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan kajian terhadap konsep dan implementasi kebijakan pariwisata dengan merujuk pada payung hukum yang dikeluarkan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah akan kebijakan *new normal* pada pariwisata, dengan judul **“Implementasi Kebijakan *New Normal* Pariwisata Pada Saat Pandemi Covid 19 Di Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan New Normal pariwisata pada saat pandemic covid-19 di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui implementasi kebijakan New Normal pariwisata pada saat pandemic covid-19 di Sumatera Barat terhadap industry pariwisata.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi instansi khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam langkah untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan pariwisata setelah pandemic Covid-1

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai referensi dalam pengkajian analisis pengembangan pariwisata dapat menjadi bahan rujukan dan referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan datang.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sektor pariwisata menjadi awal perkembangan industri di provinsi Sumatera Barat pada masa depann. Peran pemerintah sangat penting untuk kenyamanan atau perlindungan terhadap wisatawan, perlu adanya peraturan-peraturan untuk kepentingan tersebut. Dalam Penelitian Laurensius Arliman. S. (2018) yang berjudul Peran investasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi bidang pariwisata di Povinsi Sumatera Barat. Menjelaskan bagaimana Pariwisata menjadi prioritas nasional dalam RPJM 2015 2019. Pembangunan pariwisata diprioritaskan dan diberi target pencapaiannya secara bertahap dari tahun ke tahun dalam periode 5 tahun RPJM

2015-2019. Oleh karna itu perlu nya kebijakan ang harus di ambil pemerintah Sumatera Barat untuk meningkatkan dan mengembangkan pariwisata disaat pandemic Covid-19.

Dalam penelitian ini terdapat 15 literatur untuk mengaitkan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya.

Tabel 3 Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Arliman S, 2018).	Peran investasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi bidang pariwisata di Povinsi Sumatra Barat	Penelitian ini Menjelaskan bagaimana Pariwisata menjadi prioritas nasional dalam RPJM 2015 2019. Pembangunan pariwisata diprioritaskan dan diberi target pencapaiannya secara bertahap dari tahun ke tahun dalam periode 5 tahun RPJM 2015-2019. Sektor pariwisata menjadi awal perkembangan industri di provinsi Sumatera Barat pada masa depann. Peran pemerintah sangat penting untuk kenyamanan atau perlindungan

			<p>terhadap wisatawan, perlu adanya peraturan-peraturan untuk kepentingan tersebut. Hal ini karena wisata dianggap sebagai salah satu sektor di pemerintahan yang menjadi penunjang kemakmuran bangsa dan membantu dalam pembangunan negara pada saat ini. Sehingga perlu nya ada pengembangan pariwisata di setiap daerah-daerah di Indonesia. Hal ini bisa dikatakan berhasil ketika pariwisata mampu menyerap jumlah tenaga kerja, peningkatan perputaran dan pendistribusian uang di daerah wisata, serta peningkatan ekonomi masyarakat (Arliman S,</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			2018).
2.	Dian Herdiana. (2020)	Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)	Membahas soal COVID-19 merupakan penyakit pandemi yang telah menjangkiti banyak kota di Indonesia, dampaknya yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 melibatkan banyak aspek antara lain ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan banyak lagi. Berdasarkan masalah yang disebutkan di atas artikel ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dampak COVID-19 terhadap pariwisata di Kota Bandung yang merupakan salah satu kota pariwisata di provinsi jawa barat, penelitian ini juga dimaksudkan untuk merekomendasikan kebijakan apa yang harus dibuat ole pemerintah

			<p>tersebut Kota Bandung mengembalikan pariwisata ke kondisi sebelum wabah COVID-19. Ini Penelitian menggunakan metode model building dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil mengungkapkan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak wabah COVID-19</p> <p>Kota Bandung, upaya pemulihan pariwisata dari COVID-19 harus komprehensif dan berkelanjutan.</p> <p>Pemerintah Kota Bandung dan pengusaha pariwisata berada dituntut untuk melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengembangkan pemulihan pariwisata</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			instrumen kebijakan yang mencakup upaya pemulihan internal seperti bencana manajemen, pengembangan kapasitas organisasi dan upaya pemulihan eksternal seperti kebijakan relaksasi pariwisata dan promosi pariwisata.
3.	(Chatamallah, 2008)	Strategi Public Relation dalam Menangani Promosi Wisata di Provinsi Banten.	menjelaskan strategi untuk mengungkap kegiatan dengan cara marketing public relations yang ditujukan untuk mempromosikan sejumlah objek wisata kepada masyarakat luas. Untuk kegiatan ini sebagai perwujudan dari strategi public relation yaitu menggunakan tiga taktik, yaitu untuk menarik (pull strategy), untuk mendorong (push strategy), dan upaya

			<p>untuk mempengaruhi atau menciptakan opini publik yang menguntungkan serta public relation, yang mampu mempengaruhi kesadaran publik dalam upaya strategi promosi objek wisata di daerah Banten (Chatamallah, 2008)</p>
4.	Tinggi, S. (2019)	<p>Pendekatan <i>Unique Point Selling</i> (UPS) Dalam Reformulasi Startegi Pemasaran Pulau Gili Trawangan Pasca Gempa.</p>	<p>Menjelaskan bagaimana strategi promosi pariwisata di pulau Gili Trawangan, dalam penelitian metode yang dipakai menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan purposive sumpling melalui deep interview. Hal yang ingin dikaji adalah dari pendekatan unique seling point yang dimiliki oleh destinasi wisata. Hasil penelitian adalah berdasarkan</p>

			<p>unique selling point yang dimiliki Pulau Gili Trawangan pasca gempa, pendekatan strategic yaitu melalui reformulasi strategi, positioning, dan pencitraan (image). Ketiga strategi ini dominan dilakukan dengan program aksi didalamnya namun tetap pada satu program kampanye yaitu “Lombok Bangkit” Pendekatan (Tinggi & Mataram, 2019) strategi yang terimplementasi dalam pemasaran pulau Gili Trawangan pasca gempa ternyata memiliki keterkaitan antara unique selling point dengan 4 karakteristik yang dimilikinya, dengan atau mempengaruhi strategi positioning dan pencitraan (image). Jadi</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			dalam hasil akhirnya positioning. Dan outputnya terbentuk atau terbangun pencitraan Kawasan.
5.	(Han & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 2019)	Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Kota Bogor dalam Membangun Citra Destinasi Wisata Halal.	Menjelaskan strategi untuk membangun citra wisata halal di Kota Bogor yang dilakukan dengan cara mempromosikan melalui media sosial, media cetak, dan media elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Serta perlu adanya kerjasama yang baik antara Dinas Pariwisata, masyarakat untuk membangun citra destinasi wisata halal di Kota Bogor. Sehingga adanya strategi mengoptimalkan, mendorong, mempertahankan dan menyatukan yang

			<p>menjadi tempat acuan agar lebih maksimal. Kelebihan dalam jurnal ini dapat mengkolaborasikan kepada masyarakat dengan baik. Serta kekurangannya jangka Panjang yang di peroleh kerjasama dengan dinas tidak di jelaskan (Han & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 2019)</p>
6.	(Rahmatika, Kusumastanto, & Sadelie, 2017)	<p>Manejement pengembangan kebijakan wsiata bahari di Kawasan ekonomi khusus mandalika Lombok tengah (studi kasus pantai kuta)</p>	<p>Dalam penelitian ini bertujuan untuk mngetimasi daya dukung sebagai kondisi supply, mengetimasi kondisi demand dan nilai ekonomi Kawasan, serta merumuskan strategi kebijakan pengembangan wisata bahari secara berkelanjutan dipantai kuta. Kemudian strategi dalam penulisan beliau</p>

			yaitu dengan cara analisis penawaran wisata dengan pendekatan analisis daya dukung, analisis permintaan wisata Travel Cost Method (TCM), analisis kelayakan finansial, analisis prospektif dan analisis dinamik (Rahmatika, Kusumastanto, & Sadelie, 2017)
7.	Andi Setyo Pambudi, Muhammad Fikri Masteriarsa, Aditya Dwifebri Christian Wibowo, Imroatul Amaliyah, Adhitya Kusuma Ardana (2020) (Pambudi et	Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19.	Membahas tentang bagaimana Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Semua ini berdampak kepada pekerja sektor pariwisata, semua ini mengalami penurunan penghasilan, khususnya yang terkait penyedia akomodasi dan makanan serta minuman;

	al., 2020)		<p>perdagangan besar dan eceran; reparasi motor dan mobil serta pergudangan dan transportasi (BPS, 2020). Hal ini terjadi karena negara melakukan pembatasan sosial serta pelarangan kunjungan wisatawan antar daerah maupun dari luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis potret pariwisata Indonesia saat Pandemi Covid-19 dan memberikan rekomendasi recovery adaptasi kebijakan ekonomi, baik jangka pendek, maupun jangka menengah dan panjang (Pambudi et al., 2020)</p>
8.	Kanom, Nurhalimah, Randhi Nanang Darmawan	PARIWISATA BANYUWANGI PASCA COVID 19	<p>Penelitian ini menjelaskan bagaimana mencari solusi terbaik untuk memulihkan</p>

	(2020) (Darmawan et al., 2020)		kemblai pariwisata di Banyuwangi akibat dari pandemic Covid-19. Akibat dari adanya Pandemi Covid-19 ini membuat lumpuhnya kegiatan ke pariwisata pada tahun 2020 di Banyuwangi. Hal ini berdampak dalam hal pembangunan dan pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Oleh karena itu perlu adanya beberapa formulasi strategi yang ideal dan relevan untuk memaksimalkan potensi tersebut diantaranya adalah; Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Strategi Pengembangan Destinasi
--	-----------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Pariwisata dan Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Strategi Pengembangan Kelembagaan Dan Manajemen Destinasi serta Strategi Pengembangan Promosi Destinasi Pariwisata dan Strategi Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan (Darmawan et al., 2020)</p>
9.	Vivi Ukhwatul KMasbiran. (2020)	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pariwisata Sumatera Barat.	<p>Membahas tentang bagaimana upaya untuk mengatasi krisis pariwisata dalam situasi pandemic Covid-19 terhadap pariwisata Sumatera Barat yang telah menyebabkan terjadinya penurunan kunjungan wisman dan wisnus. Serta adanya yang terkena dampak dari</p>

			<p>Pandemi Covid-19 ini seperti, pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, tenaga kerja, kerugian dan penurunan pendapatan usaha. Dengan hal itu perlunya ada kebijakan yang harus diambil untuk pengelolaan krisis dan mitigasi dampak pandemi terhadap pariwisata Sumatera Barat.</p>
10.	<p>Nurhalimah, Randhi Nanang Darmawan, dan Kanom (2020)</p>	<p>Analisi Dampak Perkembangan Pariwisata Pulau Santen Banyuwangi Pasca Pandemi Covid-19.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang bagaimana untuk mengetahui dampak dari pasca pandemi Covid- 19 terhadap perkembangan pariwisata di Pulau Santen. Akibat dari adanya pandemic Covid- 19 ini mengakibatkan dampak perkembangan pariwisata di Pulau Santen, dalam bidang</p>

			<p>ekonomi mengakibatkan pendapatan pengelola dan pelaku industri menurun drastic. Serta perlunya adanya penerapan dalam hal menjalankan kegiatan harus mematuhi aturan yang ditetapkan di destinasi wisata dengan tetap memakai masker, menjalankan protokol kesehatan, tetap emnjaga jarak dalam berwisata, keamanan, protokol transportasi, dan juga ikut menjaga kebersihan area wisata Pulau Santen.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari beberapa studi terdahulu yang diatas, bahwa dapat disimpulkan penelitian ini pada dasarnya memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dilakukan disaat bencana melanda seluruh dunia, yang membuat matinya pertumbuhan dunia pariwisata di seluruh Indonesia, salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Dapat kita ketahui pada tahun 2020 seluruh dunia

digencarkan munculnya suatu virus *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa dikenal dengan pandemi Covid-19. Akibat adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak sektor di pemerintahan yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini salah satunya di sektor pariwisata, termasuk pariwisata di Sumatera Barat. Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian Provinsi Sumatera Barat yang bergantung pada sector pariwisata yang ada di Sumatera Barat, yang mengakibatkan berhentinya pariwisata di Sumatera Barat membuat para wisatawan domestic maupun mancanegara tidak bisa berwisata di Sumatera Barat. Didalam penelitian ini membahas Bagaimana kebijakan New Normal pariwisata pada saat pandemic covid-19 di Sumatera Barat.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Implementasi

Menurut Guntur Setiawan (2004: 39) yang dikutip dalam Hadiyanti, dalam buku yang berjudul Implementasi dalam birokrasi Pembangunan menjelaskan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dengan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Nurdin Usman (2002: 70) dalam bukunya yang berjudul Konteks implementasi berbasis kurikulum menyatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah, implementasi adalah suatu aspek yang sangat penting. Nugroho (2009: 494) dalam (Raditya, dkk: 196) menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan itu.

Merujuk pada pendapat Van Meter dan Van Horn, serta Mazmanian dan Sebatier dalam dalam Raditya dkk. (2008: 196), sebuah proses yang bersifat implementatif bukan hanya tanpak dari perilaku badan-badan administratif yang melaksanakan program, tetapi juga keseluruhan stakeholder terkait, jaringan komunitas, kemasyarakatan, jaringan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Implementasi adalah keseluruhan perilaku organisasi pemerintahan, baik dari tingkat terendah sampai dengan yang tertinggi.

Menurut Edward III 1980 (dalam Ratri, 2014: 4) ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan yakni: Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. **Komunikasi:** Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, consist ensi, dan kejelasan. Yang dimaksud transmisi ini yaitu dimana kebijakan publik tersebut disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan publik itu sendiri tetapi

juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut.

2. **Sumber Daya:** Sumber daya manusia, SDM adalah variabel penting dalam mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Edward III Sumber daya manusia harus cakap dan cukup. Artinya dalam sumber daya manusia itu harus memadai secara jumlah atau cukup serta terampil dan ahli atau cakap. Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, karena jika anggaran itu terbatas maka akan menghambat pelaksanaan program itu sendiri, dan juga mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3. **Disposisi:** dimana disposisi ini meliputi kemauan atau keinginan dari para pelaku kebijakan untuk menjalankan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Proses dari disposisi ini membutuhkan pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian muncul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan itu sendiri.

4. **Struktur Birokrasi:** dalam implementasi kebijakan birokrasi menjadi salah satu organisasi yang sering menjadi pelaksana birokrasi. Dalam

birokrasi ini ada dua karakteristik utama yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran dasar atau Standard Operating procedure (SOP) yang dimana SOP ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementator. Dan Fragmentasi, dalam fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi.

1.6.2 Kebijakan

Penegertian kebijakan pada hakikatnya dibuat atas dasar kebijakan yang sifatnya sangat luas. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan yaitu sebuah rangkaian konsep yang memiliki asas atas dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara mengambil keputusan (tentang pemerintah, organisasi, dsb) serta pernyataan tujuan, prinsip, dan sebagai pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan juga bisa dikatakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam susunan tertentu. Sedangkan kebijakan Pemerintah yaitu suatu keputusan yang dibuat dengan sistematis oleh pemerintah dengan tujuan dan maksud tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Kebijakan digunakan untuk menunjukkan dan menentukan pilihan terpenting dalam menjalankan kehidupan, baik kehidupan organisasi ataupun pemerintahan. Kebijakan harus bebas dari berbagai makna yang terselubung yang bisa dicakup dalam kata politis yang sering dikatakan mengandung keberpihakan akibat adanya

kepentingan. Kebijakan adalah sebuah keputusan yang telah berlaku yang dijalankan secara konsisten serta berulang-ulang, baik dalam hal pembuatannya maupun pelaksanaannya (yang terlibat dalam kebijakan) (Anggara, 2014)

Menurut penjelasan Carl J. Frederick yang dikutip oleh Leo Agustino (Rushananto, 2014) , kebijakan adalah rangkaian tindakan / kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau pemerintah untuk mencapai tujuan dalam suatu lingkungan dengan hambatan, kesulitan dan peluang.

Menurut Faried Ali dan Andi Syamsu Alam (2012) (dalam Lintjewas Olga, dkk, 2016: 84) mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai pernyataan kehendak atas pilihan alternatif yang dikehendaki untuk dilakukan dan yang dibangun atas dasar pengaturan kehendak dalam aktualisasinya dirumuskan ke dalam bentuk perundang-undangan. Pilihan alternatif yang dikehendaki oleh pemerintah yang dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurut Nugroho (2003) (Amir 2015: 53), kebijakan yang ideal hendaknya didasarkan pada keadaan tertentu atau mengacu pada tantangan saat ini dan masa depan. Model pragmatis dalam kebijakan dan model ini banyak di adopsi di Negara berkembang dan maju di Asia. Solichin Abdul Wahab menjelaskan bahwa para ahli terbagi dalam pengertian kebijakan.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan beberapa tanda, yaitu kebijakan tidak boleh sama dengan pengambilan keputusan. Kebijakan tidak sepenuhnya bersifat administrative. Kebijakan adalah perilaku atau tindakan atau tidak ada tujuan tertentu. Kebijakan bersumber dari evaluasi dan refleksi. Kebijakan itu suatu peran antara organisasi public.

RC Chandler dan JC Plano mengemukakan dalam Syafi'ie (Rohman et al : 963) bahwa kebijakn public adalah penggunaan strategis sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah public. Dalam kebijakan public, indicator merupakan alat penting untuk memgevaluasi kinerja kebijakan, Dengan indikator ini peneliti dapat mengetahui apakah strategi ini berhasil atau gagal dari program. Sebagai alat ukur ada dua indikatornya sebagai berikut;

Penelitian ini mengikuti teori yang dikemukakan oleh Nisa (2014: 149-150) dan menggunakan dua indikator kebijakan yaitu indikator keluaran kebijakan dan indikator hasil kebijakan (Rachman Nisa, 2014: 149-150):

1. Indikator keluaran kebijakan

Indikator keluaran kebijakan meliputi ruang lingkup kebijakan, kemungkinan penyimpangan, tingkat perolehan, frekuensi tindakan, kesesuaian tujuan layanan, tanggung jawab, dan kesesuaian rencana dan kebutuhan masyarakat. Di sini penulis memilih beberapa indikator yang terkait dengan penelitian ini untuk mencapai akurasi pengukuran kinerja

keluaran kebijakan. Indikator strategi keluaran yang dianggap relevan yaitu: hak akses, ketepatan pelayanan, dan penerapan program terhadap kebutuhan.

2. Indikator pencapaian kebijakan

Indikator outcome kebijakan digunakan untuk mengukur hasil implementasi kebijakan. Menurut Purwanto (Rachman Nisa), dampak suatu kebijakan biasanya berkaitan dengan perubahan kondisi penduduk sasaran kebijakan, dari kondisi awal yang buruk (kesehatan yang buruk, kemiskinan, dll.) Menjadi kondisi baru yang lebih diinginkan. (Lebih sejahtera, lebih sehat, dll.). Dalam studi ini, indikator yang digunakan adalah: hasil sementara dari keluaran kebijakan, hasil jangka menengah dan hasil jangka panjang.

1.6.3 Kebijakan Pariwisata

Kebijakan pariwisata umumnya dipandang sebagai bagian dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi berhubungan dengan struktur dan pertumbuhan ekonomi yang biasanya diwujudkan dalam perencanaan pariwisata. Beberapa faktor kunci yang menjadi perhatian kebijakan ekonomi misalnya 11 ketenagakerjaan, investasi dan keuangan, industri, dan perdagangan (Gee, 2000: 28) dalam (Suardana, 2016). Formulasi dalam penyusunan kebijakan pariwisata adalah tanggung jawab penting yang harus dilakukan oleh pemerintah yang ingin mengembangkan atau mempertahankan pariwisata sebagai bagian yang integral dalam perekonomian.

Menurut Gun and Var (2002: 106) menyebutkan ruang lingkup kebijakan pariwisata nasional telah menjadi alat promosi untuk menarik kunjungan wisatawan. Kebijakan yang dibuat semua untuk usaha peningkatan citra destinasi wisata. Dalam dekade terakhir kerjasama dan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan swasta semakin kuat. Kebijakan pengembangan pariwisata perlu dilaksanakan oleh sektor swasta serta sektor publik. Untuk itu sinergi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata.

Menurut Mill and Morrison (dalam Michael Hall, 2000:27) (Suardana, 2016) ada empat bidang utama keterlibatan sektor publik dalam pariwisata yaitu:

1. Koordinasi

Pariwisata yang terdiri dari berbagai macam sektor sering menimbulkan konflik kepentingan, maka koordinasi dalam pemanfaatan sumber daya sangat penting. Selain itu penyeimbangan berbagai peran dalam proses pengembangan pariwisata menjadi tanggung jawab pemerintah.

2. Perencanaan

Perencanaan pariwisata terjadi dalam bentuk pengembangan, infrastruktur, promosi dan pemasaran, struktur (organisasi yang berbeda-beda) dan skala (internasional, nasional, local dan sektoral). Perencanaan pariwisata harus berjalan seiring dengan kebijakan pariwisata. Tetapi dalam pembentukan

kebijakan, perencanaan merupakan proses politik yang hasilnya bisa menjadi dominasi bagi kepentingan dan nilai berbagai pihak.

3. Perundang-undangan dan peraturan

Pemerintah mempunyai kekuasaan hukum dan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan industry pariwisata. Keterlibatan pemerintah mulai dari kebijakan paspor dan visa, pemanfaatan lahan, tenaga kerja, upah dan lainnya.

4. Kewirausahaan dan stimulasi

Membiayai penelitian pariwisata, menstimulasi pariwisata melalui pemasaran, promosi, dan pelayanan pada pengunjung. Menurut Mildleton (Michael Hall, 2000: 34) dalam (Suardana, 2016), pemasaran merupakan fungsi dominan dalam kebijakan penyelenggaraan pariwisata.

1.6.4 Pariwisata

Menurut teori ini, sebagian orang mengatakan: “Pariwisata adalah jenis industri baru yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan mendorong sektor produktif lainnya.” (Nyoman S. Pendit, 1999: 35)

Pariwisata diartikan sebagai “salah satu industri hak asasi manusia yang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan pengaktifan sektor produksi lainnya di negara penerima

pariwisata. Selain itu, pariwisata juga merupakan sektor kompleks yang mencakup Industri dalam pengertian tradisional, seperti industri kerajinan tangan dan souvenir. Secara ekonomi, akomodasi dan transportasi juga dianggap sebagai industri. ”(Salah Wahab, 1996: 5)

Felix Olorunfemi dan Usman, pandangan lain yang diungkapkan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa industri pariwisata adalah:

"Konsep pariwisata Imhe digambarkan sebagai waktu luang dan aktivitas bisnis di mana orang bepergian di luar lingkungan sehari-hari dan tinggal tidak lebih dari setahun. Dan tujuan lain yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut."

Konsep pariwisata dapat digambarkan sebagai kegiatan di mana orang meninggalkan tempat tinggal aslinya untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak terkait dengan pekerjaan turis tidak lebih dari satu tahun. Tempat-tempat yang dikunjungi. Secara ekonomi pengertian pariwisata tidak terlalu jelas karena bentuk dan jenis pariwisata yang ada saat ini belum memiliki batasan yang cukup jelas.

Menurut teori dari (Robert McIntosh dan Shasikant Gupta), teori tersebut meyakini bahwa pariwisata mengacu pada interaksi atau hubungan antara wisatawan dalam suatu bisnis atau interaksi yang menarik dengan pemerintah sebagai tuan rumah atau masyarakat setempat sebagai tuan rumah. Memberikan layanan bagi wisatawan atau turis.

Karena pariwisata berbeda menurut sudut pandang masing-masing, (Soekadijo) mengemukakan sudut pandang bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan wisatawan. Semua kegiatan tersebut dapat disebut dengan kegiatan pariwisata, salah satunya adalah meningkatkan daya tarik wisatawan terhadap tempat wisata dengan menambah infrastruktur yang memadai, antara lain penyediaan hotel atau penginapan yang nyaman, obyek wisata terkini, dan penyediaan pusat hiburan. Sediakan sarana transportasi yang memadai.

Teori lain adalah bahwa pariwisata adalah semua interaksi dan pengaruh yang disebabkan oleh perjalanan dan tempat tinggal orang asing, tetapi hanya sebagai “persinggahan”, yaitu tidak bermaksud untuk tinggal dan tidak pindah ke tempat asing untuk bekerja. (Hunkeziekar dan K.Krapf,)

“Teori lain juga menggambarkan bahwa Kepariwisataan merupakan merupakan beberapa bentuk dari sebuah perjalanan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap suatu keinginan. Pariwisata dapat dilihat dari beberapa wujud melalui gejala-gejala seperti:

1. “Berdasarkan pada jumlah orang yang berpergian

- a. Pariwisata Individu

Pariwisata jenis ini ditandai dengan jumlah orang yang berpergian hanyalah seseorang ataupun satu keluarga saja yang berpergian.”

- b. “Pariwisata Rombongan

Pariwisata jenis ini di tandai dengan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang biasanya merupakan sebuah relasi, dan kemudian melakukan perjalanan.”

2. Menurut tujuan dari perjalanan

a. Pariwisata yang dilakukan dengan tujuan untuk bersantai atau ber rekreasi (Refreshing).

Pariwisata jenis ini dilakukann dengan tujuan perjalanan mengembalikan kesegaran baik fisik ataupun mental untuk setiap wisatawan yang melakukan perjalanan. Secara singkat dapat di katakan jika perjalanan jenis ini di fungsikan untuk refreshing ataupun relaksasi.

b. Pariwisata budaya

Pariwisata atau perjalanan jenis ini bertujuan unrtuk menambah informasi dan wawasan mengenai sebuah kebudayaan yang ada dan juga untuk memuaskan kebutuhan untuk berlibur. Perjalanan jenis ini dapat dilakukan di berbagai daerah di Indonesia sendiri ataupun dilakukan di negara asing.

c. Pariwisata kesehatan

Pariwisata ataupun perjalanan jenis ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu mendapatkan kesehatan khususnya bagi seseorang yang memang memerlukan perawatan medis yang terbaik di suatu

wialayah yang memang menyediakan fasilitas yang mendukung seperti, Hot Spring, daerah pemandian dengan air yang mngandung belerang guna menyembuhkan penyaki kulit.

d. Pariwisata Olahraga

Pariwisata ataupun perjalanan jenis ini bertujuan untuk dapat memberikan kepuasan bagi wisatawan yang memang memiliki hobi berolahraga seperti diving (olahraga menyelam), golf, berburu di hutan, mendaki gunung, bermain ski dan lain lain.

e. Pariwisata Studi Banding

Merupakan salah satu jenis pariwisata ataupun perjalanan dengan tujuan untuk melakukan studi ataupun pembelajaran ataupun pertemuan yang bersifat ilmiah, seperti kunjungan politik. pariwisata ini merupakan salah satu pariwisata dengan budget yang tidak sediikit karena fasilitas yang di perlukan seperti pertemuan yang dilaksanakan di negara asing. Selain itu untuk melakukan perjalan jenis ini harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti letak geografis sebuah negara, tersedianya akses yang memadai, seta perkiraan iklim dan cuaca.

f. Terlindungnya Asset-Aset Budaya

Merupakan seni budaya dan tradisi menjadi aset utama pariwisata karena industri pariwisata harus bertumpu pada keunikan, kekhasan, dan kelokalan dari masing-masing daerah di Tanah Air.

g. Partisipasi Masyarakat

Kegiatan yang membangkitkan perasaan dan termasuk atau terlibat dalam kegiatan pengorganisasian. Mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi adalah partisipasi aktif masyarakat, atau partisipasi ini dapat berarti ikut serta dalam proses penentuan arah strategis kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

3. Pariwisata menurut mode transportasi

- a. Pariwisata dengan transportasi jalur laut
- b. Pariwisata dengan transportasi jalur udara
- c. Pariwisata dengan transportasi jalur darat

4. Pariwisata berdasarkan dengan letak geografis

a. Pariwisata Regional

Merupakan salah satu perjalanan atau pariwisata yang dilakukan oleh seorang wisatawan dengan tujuan mengunjungi beberapa negara yang memiliki sektor pariwisata yang cukup terkenal.

b. Pariwisata Nasional (Domestik)

Pariwisata ataupun perjalanan jenis ini dilakukan oleh seorang wisatawan lokal di suatu negara asal atau negara tempat dia tinggal.

c. Pariwisata Mancanegara (Internasional)

Merupakan salah satu perjalanan pariwisata dengan tujuan berbagai negara yang ada di dunia

5. Pariwisata menurut usia

a. Pariwisata dengan batas usia Dewasa

b. Pariwisata dengan batas usia Remaja

6. Pariwisata menurut biaya (Tingkat harga dan tingkat sosial)

a. Pariwisata dengan biaya yang murah

b. Pariwisata dengan biaya yang mahal

c. Pariwisata dengan biaya yang sangat mahal (mewah)

7. Pariwisata menurut gender

a. Pariwisata yang di khususkan untuk perempuan

b. Pariwisata yang di khususkan untuk laki laki

Berdasarkan pendapat yang telah di kemukakan oleh (Wahab, 1996;6) di katakan bahwa objek wisata mempunyai jenis jenis yang berbeda, sedangkan di dalalam kamus besar Bahasa Indonesia karya (J.S. Badudu) objek wisata dapat di artikan sebagai sesuatu yaang yang di jadikan sebagai sasaran. Sedangkan pengertiannya sendiri objek wisata merupakan suatu objek yang di kunjungi dan memiliki tempat yang indak jika dilihat baik dari segi sejarah ataupun dari segi fisik.

Objek wisata sendiri dapat dikatakan sebuah potensi yang dapat menjadi daya tarik seorang wisatawan untuk datang dan singgah di suatu daerah. Dan berdasarkan daya tariknya menurut (Gamal Soewantoro,1997;19) objek wisata sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

a. Objek wisata dengan daya tarik budaya

Objek wisata dengan jenis daya tarik ini termasuk objek wisata dengan objek wisata yang berhubungan dengan kebudayaan lokal baik itu sejarah, museum ataupun objek kesenian seperti lukisan, alat musik dan lain lain

b. Objek wisata dengan daya tarik alam

Objek wisata dengan jenis ini merupakan objek wisata yang mengandalkan sumber daya alam sebagai pilar utama dalam menarik wisatawan untuk datang dan berkunjung di suatu objek wisata.

c. Objek wisata dengan daya tarik khusus

Objek wisata dengan jenis ini didasarkan dengan tujuan tertentu atau tujuan khusus yang akan dilakukan oleh seorang wisatawan.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu hasil dari sebuah kesimpulan yang menjelaskan terkait suatu konsep singkat, tegas dan jelas (Chourmain, :36). Dapat dikatakan untuk menjadikannya sebuah kesimpulan perlunya pemahaman mengenai sebuah pengertian agar menjadi lebih mengerucut dan menghindari

kesalahpahaman dalam memahami sebuah istilah atau definisi dalam pengerjaan yang ada didalam penelitian ini.

Berikut adalah batasan konsep dalam penelitian ini yaitu:

1.7.1 Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.

1.7.2 Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep yang memiliki prinsip berdasarkan rencana kerja, kepemimpinan, dan cara mengambil keputusan (terkait dengan pemerintahan, organisasi, dll.), dan menyatakan tujuan, prinsip, dan memberikan pedoman bagi manajemen untuk mencapai tujuan.

1.7.3 Kebijakan Pariwisata

Kebijakan pariwisata umumnya dipandang sebagai bagian dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi berhubungan dengan struktur dan pertumbuhan ekonomi yang biasanya diwujudkan dalam perencanaan pariwisata.

1.7.4 Pariwisata

Merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dengan sementara waktu untuk mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan. Serta adanya interkasi antara yang datang berkunjung dan masyarakat untuk memberikan fasilitas untuk kenyamanan wisatawan yang datang.

1.8 Definsis Operasional

Definisi Operasional yakni indikator-indikator dalam mengukur variable penelitian yang diturunkan dari kerangka teori. Menurut Sudaryono, definisi operasional dapat didefinisikan sebagai petunjuk dalam mempermudah peneliti menentukan sebuah variable dan indicator yang akan diuji secara empiris (Dr. Sri Hernawati, drg., 2017).

Definisi operasional dalam penelitian adalah bagaimana kebijakan New Normal pariwisata pada saat pandemic covid-19 di Sumatera Barat yang akan dijelaskan dalam beberapa indicator, Menurut George C Edward III dalam (Elsa Lettiyani, Isabella Isabella, 2017) terdapat empat indikator penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan public yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4 Defenisi Operasional

Variable	Indikator
Komunikasi	-Pemerintah membuat kebijakan new normal pariwisata pada masa pandemic covid-19

	-Pemerintah memberikan sosialisai tentang penerapan kebijakan new normal pariwisata pada masa pandemic covid-19
Sumber Daya	-Pemerintah melaukan penerapan kebijakan new normal pariwisata pada masa pandemic covid-19 dan melibatkan semua aspek yang sesuai dengan syarat dan kriteria
Disposisi	-Sebagai komitmen dalam penerapan kebijakan new normal pariwisata dan menjalankan kembali pariwisata pada masa pandemic covid-19 .
Struktur Birokrasi	-Pemerintah menjalankan kebijakan new normal pariwisata pada masa pandemic covid-19 berdasarkan SOP yang tercantum dalam guideline kebijakan.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh data agar tujuan penelitian ini sesuai dengan rancangan untuk mengawali suatu penelitian hingga selesai, sehingga menghasilkan sebuah hasil data yang di inginkan.

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah sebuah metode untuk dapat digambarkan secara sistematis mengenai sebuah keadaan, situasi, kondisi, dan fenomena yang terjadi. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mendapatkan data berupa wawancara, observasi, dokumen pribadi dan sebagainya. Dalam penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui suatu keadaan, situasi, kondisi, dan menganalisis bagaimana Implementasi kebijakan New Normal pariwisata pada saat pandemic covid-19 di Sumatera Barat ini terjadi.

1.9.2 Jenis Data

Data Primer

Menurut Sugiyono mengatakan bahwa data primer diperoleh dari sumber asli atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini dan mampu memberikan berbagai informasi. Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan wawancara melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada sumber yang mengetahui pokok permasalahan mengenai. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

Table 5 Data Primer

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi	Wawancara

Sumatra Barat (H. Novrizal)	
2. Kepala bidang pengembangan destinasi dan daya tarik wisata (Drs. Doni Hendra, M.M.	
3. Pelaku usaha pariwisata (Bpk. Rahmad)	

Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang dikumpulkan sebagai penunjang data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan dari berbagai media seperti buku, dokumen, artikel, jurnal, undang-undang, maupun peraturan-peraturan yang masih relevan dengan penelitian (Arikunto, 2010). Pada penelitian ini peneliti akan memperoleh data sekunder melalui :

Table 6 Data Sekunder

No	Sumber Data Sekunder
1	Data terdahulu yang tersedia di Dinas Pariwisata
2	Buku tentang pariwisata
3	Jurnal tentang pariwisata

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini metode pengumpul data yang umum digunakan yaitu wawancara, dokumentasi untuk mendapatkan sesuatu yang dapat disimpulkan. Dalam penelitian ini data yang peneliti sajikan yaitu bagaimana

Implementasi kebijakan New Normal pariwisata pada saat pandemic covid-19 di Sumatera Barat . Berikut ada metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data.

a. **Wawancara**

Dalam penelitian kualitatif wawancara adalah hal yang paling utama digunakan untuk mengumpulkan sebagian data. Dapat diartikan wawancara adalah gaya komunikasi antara dua orang, yang melibatkan yang ingin bertanya dan seseorang yang diajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan maksud tertentu untuk mendapatkan informassi.

Pada penelitian kali ini untuk pengumpulan data akan di lakukan wawancara untuk melakukan proses Tanya jawab ke pihak- pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini yaitu kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

Table 7 Wawancara

NO	Narasumber	Jumlah
1	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat (H. Novrizal)	1
2	Kepala bidang pengembangan destinasi	1

	dan daya tarik wisata (Drs. Doni Hendra, M.M.	
3	Pelaku usaha pariwisata (Bpk. Rahmad)	1

‘

b. Dokumentasi

Dalam penelitian akan mencari data melalui pengumpulan data yang di dapat dari buku-buku, dokumen, arsip dan laporan-laporan yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Sumatera Barat dalam Penerapan kebijakan new normal Pariwisata pada masa pandemic Covid-19 sehingga dapat dijadikan data dalam penelitian ini.

1.9.4 Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumen untuk analisis kualitatif. Ini digunakan untuk menganalisis melalui analisis untuk memberikan informasi dan dapat secara sistematis memberikan pemahaman tentang subjek.

“Metode analisis data yang digunakan dalam riset ini merupakan analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles serta

Hubberman(Sugiyono, 2007:204) ialah pengumpulan informasi, reduksi informasi, penyajian informasi serta langkah terakhir merupakan penarikan kesimpulan. Langkah- langkah tersebut sebagi berikut.”

Satu jenis.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah penyederhanaan dengan cara memilih, memusatkan, dan secara efektif mengubah informasi asli menjadi informasi yang bermakna, sehingga kesimpulan dapat ditarik dengan lebih mudah.

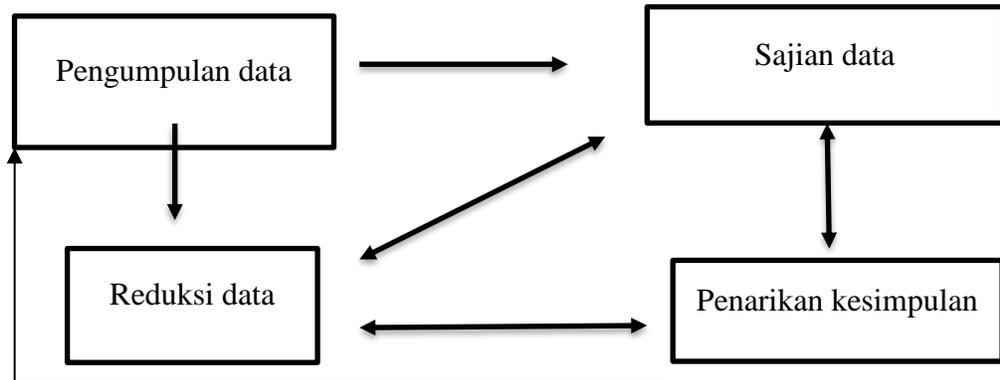
b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan dalam informasi kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian informasi merupakan bentuk pengumpulan informasi yang sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sesi terakhir dari analisis informasi yang berusaha melihat bahwa hasil reduksi informasi selalu menimbulkan permasalahan dengan tujuan yang ingin dicapai. Bandingkan informasi yang dikumpulkan

satu sama lain untuk menarik kesimpulan, seperti jawaban atas kasus yang ada.



Gambar 1 Kerangka Pikir
Teknik Analisi Data menurut Miles dan Hubberman
(sugiyono 2007:333-345)